

3. *Interorganizational Communication and Enforcement Activities* (Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antarorganisasi)

Kegiatan Komunikasi dan Penegakan Antarorganisasi dapat dikutip sebagai berikut;

“Effective implementation requires that a program’s standards and objectives be understood by those individuals responsible for their achievement. Hence, it is vital that we concern ourselves with the clarity of standards and objectives, the accuracy of their communication to implementors, and the consistency (or uniformity) with which they are communicated by various sources of information. Standards an objective cannot be carried out unless they are stated with sufficient clarity so that implementors can know what is expected of them. Communication within and between organizations is a complex and difficult process. In transmitting messages downward in an organization, or from one organization to another, communicators inevitably distort teem-both intentionally and unintentionally.”²¹

Implementasi yang efektif mensyaratkan bahwa standar dan tujuan program dipahami oleh orang-orang yang bertanggung jawab atas pencapaian mereka. Oleh karena itu, sangat penting bahwa kita memperhatikan kejelasan standar dan tujuan, keakuratan komunikasi mereka kepada pelaksana, dan konsistensi (atau keseragaman) dengan mana mereka dikomunikasikan oleh berbagai sumber informasi. Standar suatu tujuan tidak dapat dilaksanakan kecuali dinyatakan dengan cukup jelas sehingga pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. Komunikasi di dalam dan di antara organisasi adalah proses yang kompleks dan sulit. Dalam mentransmisikan pesan ke bawah dalam

²¹ Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.

suatu organisasi, atau dari satu organisasi ke organisasi lain, komunikator pasti mendistorsi teem-baik sengaja maupun tidak sengaja.

(Saling memberikan pengaruh pada karakteristik)

1. Komunikasi bersifat vertikal dan horizontal
2. Kejelasan komunikasi
3. Keakuratan informasi
4. Konsistensi terhadap komunikasi
5. Koordinasi antar lembaga pemerintah

4. *Characteristics of implementing agencies* (Karakteristik lembaga pelaksana)

Karakteristik lembaga pelaksana dapat dikutip sebagai berikut, “Numerous factors are included in this component of the model. We view this component as consisting of both the formal structural features of organizations and the informal attributes of their personnel. We are also interested in the implementing agency’s ties to other participants in the policy delivery system.”²²”.

Banyak faktor yang termasuk dalam komponen model ini. Kami memandang komponen ini terdiri dari fitur struktural formal organisasi dan atribut informal personel mereka. Kami juga tertarik dengan hubungan lembaga pelaksana dengan peserta lain dalam sistem penyampaian kebijakan.

1. Adanya sumber daya yang mumpuni dan mampu membangun karakter kebijakan

²² Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.

2. Terdapat hierarki sebagai kontrol kebijakan
3. Adanya dukungan sumber daya politik dari pemerintahan lokal baik dari legislatif maupun eksekutif
4. Vitalitas suatu organisasi untuk membangun nilai-nilai kebijakan
5. Pelaku kebijakan mampu membangun jaringan dan keterbukaan informasi

5. *Economic, Social, and Political* Conditions (Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik)

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik dapat dikutip sebagai berikut;

“The impact of economic, social, and political conditions on public policy has been the focus of much attention during the past decade. Although the impact of these factors on the implementation of policy decisions has received little attention, they may have profound effect on the performance of implementing agencies.”²³

Dampak kondisi ekonomi, sosial, dan politik pada kebijakan publik telah menjadi fokus banyak perhatian selama dekade terakhir. Meskipun dampak dari faktor-faktor ini pada pelaksanaan keputusan kebijakan telah menerima sedikit perhatian, mereka mungkin memiliki efek mendalam pada kinerja lembaga pelaksana.

(dipengaruhi oleh sumber daya seta memberikan pengaruh pada disposisi)

1. Adanya dampak ekonomi, sosial, dan politik yang ditimbulkan dari implementasi
2. Respons publik terhadap implementasi kebijakan

²³ Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.

3. Kondisi publik yang mendorong kebijakan
4. Ketertarikan swasta dalam mendorong pemerintah, publik, dan kebijakan

6. *The Disposition of Implementors* (Disposisi Pelaksana)

Disposisi dalam pelaksanaan dapat dikutip sebagai berikut,

“Each of the components of the model discussed above must be filtered through the perceptions of the implementor within the jurisdiction where the policy is delivered. Three elements of the implementors’ response may affect their ability and willingness to carry out the policy; their cognition (comprehension, understanding) of the policy, the direction of their response toward it (acceptance, neutrality, rejection), and the intensity of that response.

The intensity of implementors’ dispositions may affect the performance of the policy. Those holding intense negative preferences may be led to outright and open defiance of the program’s objectives. When this occurs the implementation question may become moot-subordinates may refuse to participate in the program altogether. Less intense attitudes may cause implementors to attempt surreptitious diversion and evasion, a more common pattern. In these circumstances one may have to look to the role of oversight and enforcement to explain variations in the effectiveness of implementation.²⁴”

Setiap komponen model yang dibahas di atas harus disaring melalui persepsi pelaksana dalam yurisdiksi tempat kebijakan disampaikan. Tiga elemen tanggapan pelaksana dapat mempengaruhi kemampuan dan kemauan mereka untuk melaksanakan kebijakan; kognisi mereka (pemahaman, pemahaman) tentang kebijakan, arah respons mereka terhadapnya (penerimaan, netralitas, penolakan), dan intensitas respons itu.

²⁴ Metter, D. V., & Horn, C. V. (1975). The Policy Implementation Process Conceptual Frame Work. *Journal Administration and Society*.

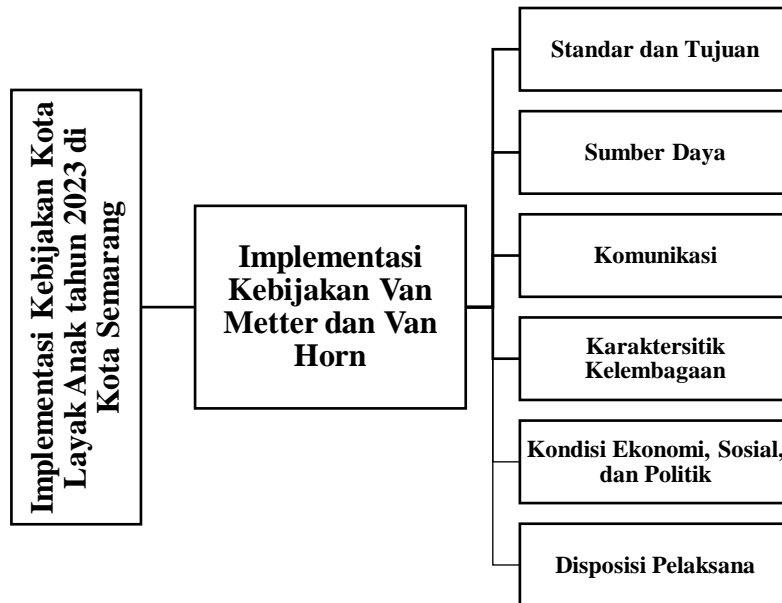
Intensitas disposisi pelaksana dapat mempengaruhi kinerja kebijakan. Mereka yang memiliki preferensi negatif yang intens dapat dituntun untuk langsung dan terbuka menentang tujuan program. Ketika ini terjadi, pertanyaan implementasi dapat menjadi diperdebatkan-bawahan dapat menolak untuk berpartisipasi dalam program sama sekali. Sikap yang kurang intens dapat menyebabkan pelaksana mencoba pengalihan dan penghindaran diam-diam, pola yang lebih umum. Dalam keadaan ini seseorang mungkin harus melihat peran pengawasan dan penegakan hukum untuk menjelaskan variasi dalam efektivitas implementasi.

1. Pelaku mampu memahami kesuksesan kebijakan terhadap kondisi publik
2. Adanya bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pelaksana
3. Adanya kesadaran untuk melaksanakan secara kontinu
4. Adanya pemahaman dari pelaksana atas kebijakan dari pemerintah
5. Adanya konsekuensi diterima apabila tidak adanya pelaksanaan
6. Pelaku kebijakan mampu melakukan antisipasi jika terdapat kegagalan
7. Terdapat alternatif atas kesadaran dari pelaku kebijakan ketika terdapat penolakan publik

Selanjutnya dalam penelitian ini akan mengadopsi implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Metter dan Van Horn yang mengemukakan keenam indikatornya sebagai landasan teori untuk membedah permasalahan dari faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang. Selanjutnya secara detail penggunaan landasan teori dan keterikatan permasalahan dalam penelitian akan dibahas pada subbab selanjutnya.

1.6 Operasionalisasi Konsep

Bagan 1.2 Bagan Operasionalisasi Konsep



1. Implementasi kebijakan publik, merupakan sebuah pelaksanaan atas perubahan peraturan ke dalam tindakan yang konkret. Implementasi kebijakan juga merupakan bagian pelaksanaan kebijakan merujuk pada serangkaian langkah yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan publik. Kemudian kaitannya dengan penelitian Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang akan menggunakan model implementasi kebijakan oleh Van Metter dan Van Horn.
2. *A Model of the Policy Implementation* merupakan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Metter dan Van Horn. Melalui berbagai variabel proses implementasi ini merupakan kegiatan yang dilakukan

untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi. Dalam penjabarannya Metter dan Van Horn mendorong implementasi kebijakan dengan indikator standar dan tujuan; sumber daya; komunikasi; karakteristik kelembagaan; kondisi ekonomi, sosial, dan politik; serta disposisi pelaksana.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak tahun 2023 di Kota Semarang” menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan metode-metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang dijelaskan dan dijabarkan oleh sejumlah individu atau sekelompok orang terhadap suatu fenomena atau masalah sosial atau kemanusiaan.²⁵ Penggunaan metode kualitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi data primer dan sekunder yang diperoleh melalui DP3A Kota Semarang untuk melakukan penggambaran prosesi implementasi kebijakan KLA di Kota Semarang.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan dengan pengambilan data di Kota Semarang. Secara spesifik penelitian ini dipusatkan pada Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan alamat Jalan Prof.

²⁵ Creswell, J. W. (2007). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. California: SAGE.

Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian tersebut dikarenakan keterkaitan organisasi lembaga pemerintahan Kota Semarang DP3A yang relevan dengan permasalahan dan judul dalam penelitian ini.

1.7.3 Subjek Penelitian

Metode *purposive sampling* menjadi penentu dalam pemilihan subjek dalam penelitian yang dikaitkan peran Implementasi Kebijakan Kota Layak Anak Tahun 2023 Di Kota Semarang. *Purposive sampling* adalah salah satu teknik pengambilan data di lapangan yang telah ditentukan tujuannya²⁶.

Metode tersebut memberi keterikatan dalam penelitian ini untuk menentukan subjek yang menjadi informan dalam penelitian ini. Oleh karenanya subjek dalam penelitian ini di antaranya adalah;

1. Indraswari Widyastuti, S.E selaku Kepala Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.
2. Feri Alfaozan, S.E, M.M selaku Pegawai Bidang Pemenuhan Hak Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang.

²⁶ Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berupa kata – kata tertulis dan dokumen-dokumen pendukung lainnya. Sedangkan Sumber data penelitian ini berupa dua macam yaitu:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan penggalan data secara langsung kepada informan/narasumber. Dalam hal ini teknik pendapatan data primer akan dilakukan dengan cara interviu/wawancara dan juga observasi secara langsung.

2. Data Sekunder

Berbeda dengan data primer, data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi literatur terhadap sumber bacaan yang berkaitan dengan data permasalahan dalam penelitian. Data sekunder dapat berupa artikel, jurnal, data pendukung, dokumentasi berupa gambar/audio/video. Penggunaan data primer dalam hal ini diharapkan mampu menjadi penguatan bagi data primer yang diperoleh di lapangan.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan pencarian data dalam penelitian yang dilakukan dengan berhadap-hadapan antara peneliti dengan narasumber, baik secara perorangan ataupun dilakukan dengan cara berkelompok. Dalam penelitian ini telah dilakukan wawancara

dengan narasumber Indraswari Widyastuti, S.E dan Feri Alfaozan, S.E, M.M yang menggambarkan proses implementasi kebijakan KLA di Kota Semarang pada Kantor DP3A Kota Semarang.

2. Observasi

Observasi merupakan sebuah partisipasi langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk mengamati subjek/objek penelitian secara terinci. Dalam observasi, peneliti akan mendapatkan data dan pengalaman secara langsung sebagai partisipan terhadap suatu fenomena atau permasalahan. Observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung yang dilakukan peneliti pada lokasi penelitian di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang dengan alamat Jalan Prof. Soedarto SH No.116, Banyumanik, Kota Semarang, Jawa Tengah.

3. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah sebuah bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan literatur terhadap buku atau jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Studi pustaka dalam penelitian ini memuat Perda Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KLA Kota Semarang, Buku Profil Anak Kota Semarang Tahun 2020-2022, dan buku serta sumber literasi yang berkaitan dengan implementasi KLA di Kota Semarang.

4. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis jejak-jejak fisik yang terekam melalui perantara media. Pengumpulan data melalui dokumentasi digunakan dengan menggali dan mengumpulkan foto/video/bahan media yang berkaitan dengan permasalahan.²⁷

1.7.6 Teknik Analisis Data

Selanjutnya setelah adanya proses pengumpulan data tercapai, untuk menunjang penyajian data dalam penelitian ini dilakukan teknik analisis data. Dalam penelitian ini mengadopsi model analisa interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman terdapat empat (4) kategori dalam teknis analisis²⁸ data, di antaranya;

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data adalah prosesi tahap awal dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mendatangi lokasi penelitian dan subjek penelitian dengan metode pengumpulan data serta klasifikasi data untuk memperoleh informasi sedetail mungkin terhadap permasalahan.

²⁷ Creswell, J. W. (2007). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. California: SAGE.

²⁸ Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. California: Sage Publications.

2. Reduksi Data

Setelah pengumpulan data, dilakukanlah proses reduksi data yang bertujuan memilah, mengelompokkan, dan mempertajam data sehingga meninggalkan data yang benar-benar diperlukan untuk disajikan. Proses reduksi data mendorong peneliti untuk menyusun laporan hasil penelitian dan membahas permasalahan yang terjadi dalam penelitian.

3. Penyajian Data

Selanjutnya, setelah data tereduksi, data akan disajikan dan ditampilkan. Dalam hal ini, penyajian data dilakukan sesuai dengan jenis penelitian kualitatif yang menyajikan pembahasan permasalahan dalam bentuk teks atau tulisan yang bersifat naratif. Selain itu untuk mendukung teks data yang tersaji, data pendukung berupa gambar, tabel, grafik, dan bagan juga dapat disajikan sebagai penyajian data pendukung.

4. Penarikan Kesimpulan

Terakhir, setelah adanya penyajian data adalah prosesi penarikan kesimpulan. Prosesi penarikan kesimpulan merupakan cara peneliti untuk menafsirkan data setelah melalui beberapa proses sebelumnya. Kesimpulan yang kredibel dalam penelitian ini dikemukakan atas tafsir dari berbagai tahap yang didukung dengan bukti yang valid serta konsisten.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Gambaran umum dari penelitian Implementasi Kota Layak Anak di Semarang tahun 2023 memuat gambaran umum dari Kota Semarang dari segi geografi dan demografi, terlebih dalam subbab demografi akan difokuskan penjelasan demografi anak di Kota Semarang. Selain hal tersebut gambaran umum yang akan dijelaskan di antaranya adalah gambaran umum dari Pemerintah Kota Semarang dan Gambaran Umum dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pemberdayaan Anak Kota Semarang. Gambaran umum pada bab ini akan menjelaskan pengantar umum yang mendukung dan berkaitan terhadap permasalahan implementasi Kota Layak Anak di Semarang.

2.1 Kota Semarang

2.1.1 Kondisi Geografi

Kota Semarang merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah seluas 373,78 km². Kondisi luasan Kota Semarang secara astronomis terletak pada 109° 35' – 110° 50' Bujur Timur dan 6° 50' – 7° 10' Lintang Selatan. Sedangkan secara letak geografis Kota Semarang di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, di sebelah timur dengan Kabupaten Demak, di sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, dan di sebelah barat dengan Kabupaten Kendal.

Selanjutnya, dengan kondisi luasan wilayah Kota Semarang membentang dari ujung pesisir hingga dataran tinggi dengan rentang ketinggian antara 0,75 meter sampai dengan 348 meter di atas permukaan laut. Pada daerah perbukitan mempunyai ketinggian 90,56 - 348 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang